RELEVANSI PERSPEKTIF ETNO-SIMBOLISME ANTHONY D. SMITH DALAM MEMPERKOKOH FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI *MYTH-SYMBOL COMPLEX* NEGARA KEBANGSAAN

Roul Alvaro Prasetyo[1*], Elsa Nurhalisa[2], Suyato[3]
[1,2,3] Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman
*Email: [1]roulalvaro.2025@student.uny.ac.id *; [2]elsanurhalisa.2025@student.uny.ac.id ; [3] suyato@uny.ac.id.*

Abstract

The Relevance of Anthony D. Smith's Ethno-Symbolism Perspective in Strengthening Pancasila Philosophy as The Myth-Symbol Complex of The Nation-State. This article aims to examine and recontextualize the position of Pancasila as a unifying tool of the nation amidst the escalating threats of social polarization and massive digital disruption. Employing a qualitative research method of literature review, this study applies the theoretical framework of ethno-symbolism by Anthony D. Smith. This approach is used to analyze Pancasila not merely as a normative principle, but as a myth-symbol complex through three main pathways: recurrence, cultural-institutional continuity, and appropriation-reinterpretation of ethnic narratives. The results indicate that to maintain the relevance of Pancasila, collective memory and national symbols must be revitalized and inclusively appropriated to suit modern needs. Pancasila has proven effective as a civil religion capable of sheltering diversity when internalized into reflective Civic Education practices and public communication in digital media. The conclusion of this research asserts that the recontextualization strategy requires a combination of critical historical narratives, inclusive civic rites, and a digital symbolic ecology. Thus, Pancasila will remain alive as an effective public language in strengthening the social cohesion of the younger generation.

Keywords: Ethno-symbolism, Pancasila, Social Cohesion, Digital disruption, Civic Education.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan merekontekstualisasi kedudukan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa di tengah eskalasi ancaman polarisasi sosial dan disrupsi digital yang masif. Menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis studi pustaka, kajian ini mengaplikasikan kerangka teoretis etno-simbolisme dari Anthony D. Smith. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Pancasila bukan sekadar sebagai asas normatif, melainkan sebagai *myth-symbol complex* melalui tiga jalur utama: rekurensi, kontinuitas institusional-budaya, dan apropriasi-reinterpretasi narasi etnik. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk menjaga relevansi Pancasila, memori kolektif dan simbol kebangsaan harus direvitalisasi serta diapropriasi secara inklusif menyesuaikan kebutuhan zaman. Pancasila terbukti mampu berfungsi secara efektif sebagai *civil religion* yang memayungi kemajemukan apabila diinternalisasikan ke dalam praktik Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang reflektif dan komunikasi publik di media digital. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi rekontekstualisasi memerlukan perpaduan antara narasi sejarah yang kritis, ritus kewargaan inklusif, serta ekologi simbolik digital. Dengan demikian, Pancasila akan tetap hidup sebagai bahasa publik yang efektif dalam memperkuat kohesi sosial generasi muda.

Kata kunci: Etno-simbolisme, Pancasila, Kohesi Sosial, Disrupsi digital, Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Di tengah meningkatnya polarisasi, disrupsi digital, dan arus globalisasi yang dapat mengikis kohesi sosial, Indonesia kembali menghadapi sebuah tantang besar untuk dapat memperkokoh kedudukan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa sekaligus sebagai orientasi bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hariyanti, 2020). Pancasila secara historis lahir dari adanya negosiasi antara beragam tradisi budaya, religius, dan intelektual yang telah lama dipahami bukan hanya sebagai asas normatif semata, tetapi juga sebagai sebuah identitas negara dan juga pilar integrasi nasional dalam masyarakat yang majemuk. Upaya untuk memperkuat kedudukan Pancasila menuntut adanya pendekatan teoretik yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana simbol, mitos sejarah, dan narasi bersama dapat menanamkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam.

Perspektif etno-simbolisme dari Anthony D. Smith dapat memberikan landasan yang kuat karena menekankan tentang peran dari mitos, simbol, tradisi, memori, dan nilai dalam pembentukan dan keberlanjutan bangsa di zaman modern dan memiliki perbedaan dengan modernisme yang cenderung memutus kesinambungan antara masa lampau dan masa kini. Smith membuat sebuah kerangka yang memiliki rentang sejarah yang panjang untuk dapat mengaitkan etnie pra-modern dengan bangsa modern melalui tiga jenis pengaruh masa lalu terhadap masa kini yaitu rekurensi, kontinuitas institusional, dan apropriasi-reinterpretasi narasi etnik oleh generasi berikutnya. Dalam kerangka ini, berbagai unsur simbolik seperti lambang, bahasa, mitos, artefak, tanah air, dan zaman keemasan menjadi sebuah imajinasi kolektif yang dapat mengikat rasa solidaritas kebangsaan (Smith, 2014).

Smith mengadopsi gagasan dari John. A Armstrong mengenai *"myth symbol complexes"* yakni kumpulan mitos dan simbol yang dapat menandai batas dan dapat memperkuat kohesi suatu etnis serta konsep *mythomoteur* yaitu sebuah mitos pendorong yang dapat menggerakan komunitas pada tujuan historisnya. Hal tersebut relevan dengan Pancasila yang dapat dihayati sebagai sebuah tatanan simbolik dan narasi historis bersama dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga ditafsirkan sebagai agama sipil *(civil religion)* yaitu seperangkat simbol dan nilai publik yang melandasi ikatan kewargaan dan dapat memperkuay kohesi antar agama dan suku (Takdir & Hafidz, 2025).

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran maupun praktik kewargaan memiliki korelasi kuat dengan penguatan karakter dan partisipasi demokratis dari generasi muda. Pancasila tidak hanya bekerja sebagai sebuah norma konstitusional tetapi juga sebagai sebuah mitos-simbol kompleks yang hidup dalam sebuah kurikulum dan buku teks yang secara klasik disorot oleh etno-simbolisme (Asshiddiqie, 2020). Pancasila berfungsi secara efektif sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat yang majemuk karena Pancasila dapat mengikat narasi nilai, asal-usul, dan memori menjadi sebuah budaya publik dan juga hukum bersama.

Pancasila sebagai agama sipil menyediakan sebuah nilai bersama, mencegah terjadinya konflik, dan juga menopang masyarakat madani (Setiawan & Santiago, 2022). Perspektif etno-simbolisme dapat memeberikan justifikasi secara sosiologis dan historis dimana *civil religion* bekerja dengan ditopang oleh mitos-simbol kompleks seperti narasi dari para pendiri bangsa, lambang negara, dan bahasa persatuan yang diapropriasi secara

lintas generasi (Tompok, 2023). Saat ini diperlukan sebuah rekontekstualisasi Pancasila di dalam media, pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler untuk dapat menjaga toleransi dan meningkatkan partisipasi aktif dari generasi muda (Sugito et al., 2021). Etno-simbolisme dapat memberikan sebuah jalan yang praktis dimana penguatan narasi memori seperti kisah para pendiri bangsa, simbol seperti bendera dan lambang negara, dan ritual publik seperti upacara dan hari besar kebangsaan dapat menjadi sarana *nation building* yang relevan pada saat ini tentu dengan tafsir yang inklusif.

Menelaah Pancasila melalui lensa etno-simbolisme dapat memungkinkan kita melihat Pancasila bukan hanya sebagai norma abstrak tetapi juga sebagai ekologi mitos-simbol yang terus hidup dan menarasikan asal-usul bangsa serta dapat menyediakan sebuah medan apropriasi kreatif antar-generasi. Kerangka tersebut sekaligus juga dapat memberi rambu etis dimana kita harus terus menjaga agar revitalisasi simbolik itu tetap demokratis, inklusif, dan berkeadilan sejalan dengan gagasan Smith bahwa nasionalisme selalu memadukan antara untuk *civic* dan *cultural* dan kita harus mampu untuk menyeimbangkannya bukan justru menafikan salah satunya (Smith, 2014).

Meskipun berbagai literatur terdahulu telah banyak mengkaji kedudukan Pancasila sebagai *civil religion* maupun urgensinya dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung berfokus pada tataran normatif. Kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kerangka etno-simbolisme dari Anthony D. Smith untuk merekontekstualisasi Pancasila khususnya sebagai *myth symbol complex* yang harus terus direapropriasi guna menghadapi tantangan polarisasi dan disrupsi digital modern masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Pancasila melalui perspektif etno-simbolisme, serta merumuskan strategi praktis rekontekstualisasinya agar tetap relevan sebagai bahasa publik yang inklusif di media dan ruang kelas. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditawarkan sebuah sudut pandang baru tentang bagaimana memori kolektif, simbol, dan narasi kebangsaan dapat direvitalisasi untuk memperkuat kohesi sosial generasi muda masa kini.

B. Metode

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) atau kajian literatur. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap sumber referensi primer dan sekunder yang relevan dengan tema nasionalisme dan Pancasila. Referensi utama yang menjadi standar kajian ini adalah pemikiran Anthony D. Smith dalam bukunya yang berjudul *"The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism"*. Selain itu, data juga dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan buku teks yang membahas mengenai *civil religion*, pendidikan kewarganegaraan, dan tantangan digital di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan etno-simbolisme. Kriteria atau standar referensi yang digunakan untuk melakukan kajian adalah kerangka tiga jalur pengaruh masa lalu terhadap masa kini dari Smith, yakni rekurensi, kontinuitas institusional-budaya, dan apropriasi-reinterpretasi (Wardah, 2023). Alur berpikir dalam melakukan kajian ini dimulai dengan mengidentifikasi tantangan polarisasi dan disrupsi digital yang mengancam kohesi sosial di Indonesia. Tahap selanjutnya adalah

menganalisis kedudukan Pancasila bukan hanya sebagai norma hukum, melainkan sebagai *myth-symbol complex* melalui lensa etno-simbolisme. Kajian diakhiri dengan merumuskan strategi rekontekstualisasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan ruang publik sebagai solusi praktis untuk memperkuat integrasi nasional.

C. Hasil Dan Pembahasan

Perspektif Teoretis Etno-Simbolisme Anthony D. Smith

Anthony D. Smith mengakui bahwa terdapat sebuah kebaruan bangsa modern dan nasionalisme sebagai ideologi modern, namun ia menolak gagasan bahwa bangsa lahir di era modern (Smith, 2014). Bagi Smith, untuk mengetahui kapan dan bagaimana sebuah bangsa bisa muncul maka harus menelusuri kondisi sosial budaya pra-modern yaitu etnie, beserta simbol, mitos, nilai, dan tradisi yang mengendap dalam jangka panjang *(la longue duree)* sehingga kita bisa menjelaskan bagaimana sebuah komunitas atau wilayah tertentu dapat menjadi sebuah bangsa. Pokok gagasan dari Smith adalah etno-simbolisme yakni sebuah pendekatan untuk menjembatani antara konstruksionisme modernis yang menekankan kebaruan dengan klaim-klaim kontinuitas historis.

Etno-simbolisme menekankan bahwa sejarah memiliki rentang yang panjang dan masa lalu membentuk parameter kultural yang memengaruhi pemahaman generasi saat ini. Smith mengkritik kaum konstruksionis yang hanya fokus pada bagaimana generasi saat ini memaknai masa lalu, bagi Smith, masa lalu juga aktif membentuk masa kini. Terdapat tiga jalur utama yang dapat menjelaskan bagaimana masa lalu dapat memengaruhi masa kini yaitu rekurensi yakni kemunculan ulang tipe atau pola sebuah bangsa dalam sejarah, kontinuitas institusional-budaya yaitu jejak lembaga atau warisan yang masih bertahan, dan apropriasi-reinterpretasi dari mitos, simbol, atau memori oleh aktor modern (Smith, 2014).

Smith membedakan etnie yaitu komunitas budaya asal dengan keyakinan leluhur bersama, memori kolektif, simbol, dan nilai dari sebuah bangsa yang dimaknai sebagai sebuah komunitas politik-budaya modern. Smith menegaskan bahwa bangsa yang kuat yang memiliki mitos asal-usul dan identitas yang kuat tetapi terdiri dari berbagai lapisan etnis yang beragam. Terdapat hubungan yang kuat antara etnie yang dominan dengan generasi bangsa selanjutnya yang sering kali terdapat beberapa kepercayaan pada mitos atau memori kebangsaan yang terus diturunkan lintas generasi sehingga dapat dikatakan bahwa bangsa modern juga bertumpu pada kondisi sosial-budaya sebelumnya dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh modernisasi semata.

Smith memetakan rute pembentukan sebuah bangsa dengan menyoroti etnie sebagai sebuah titik berangkat yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan konteks zaman. Smith menjelaskan ada tiga tipe etnie yaitu yang pertama adalah lateral atau aristokratik yaitu rute menuju bangsa modern melalui negara terpusat yang dibangun oleh kaum bangsawan dan inkorporasi birokratis atas wilayah pinggiran serta pola ini terjadi di negara barat dan diulang variasinya di Asia dan Afrika. Yang kedua yaitu vertikal/demotik yaitu rute sebuah bangsa modern melalui penemuan kembali budaya vernakular oleh kaum intelektual dan melakukan mobilisasi strata bawah yang lazim di Eropa Timuir dan Timur Tengah. Yang terakhir yaitu fragmentaris/imigran yakni pecahan etnis yang bemrigrasi dan juga membentuk sebuah bangsa baru seperti Amerika, Kanada, dan Australia yang terpisah dari etnie asal seiring berjalannya waktu (Smith, 2014).

Smith mengakui bahwa kebanyakan bangsa modern muncul setelah abda ke-18 tetapi ia menolak klaim bahwa sebuah bangsa merupakan sebuah produk modernitas belaka. Identitas dan karakter sebuah bangsa tak dapat didapat dari sebuah proses modernisasi saja. Ia juga mengkritik konstruksionisme karena cenderung elitis dan juga kurang mampu menangkap kedalaman emosi yang dapat mendorong pengorbanan pada tanah air. Memori nasional bukan sekedar sebuah narasi kekinian tetapi merupakan sejarah panjang yang terdokumentasi dan membentuk kehidupan pada saat ini berkaitan dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Sekalipun bangsa-bangsa kuno seperti Yunani, Yahudi, dan Persia telah berubah dan menjadi bangsa yang modern tetapi identitas nasionalnya masih tetap memelihara unsur etno-simbolik lama seperti mitos, memori, nilai, dan tradisi yang melegitimasi klaim kenegaraan. Memori etnie lama yang berbentuk teks, artefak, dan institusi dapat menyediakan sebuah model bagi bangsa berikutnya terutama ketika menghadapi sebuah krisis.

Smith memberikan sebuah perhatian besar pada dimensi simbolik-ritual nasionalisme. Ia menunjukkan bagaimana agama sipil melalui bentuk monumen, upacara, dan ikonografi dapat menjawab kebutuhan psikologis masyarakat sekuler. Daya imajinatif dari nasionalisme menempel kuat pada simbol-simbol lama yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman modern. Proyek nasionalis akan gagal jika yang ditawarkan tidak beresonansi dengan memori etnik yang berarti bagi publik sehingga lebih baik menemukan kembali dan mereapropriasi masa lalu etnik alih-alih membuat narasi yang terputus dari sejarah budaya di masa lalu.

Bangsa modern dapat dipahami sebagai sebuah komunitas politik-budaya yang baru dan bertumpu pada sumber daya etno-simbolik lama. Bangsa modern dapat diakui baru segi bentuk kenegaraan dan kewargaan tetapi identitasnya seperti nama, simbol, ritual, bahasa, lambang, dan kisah asal-usulnya berasal dari memori yang terus dipelihara. Ini bukan pembenaran terhadap esensialisme tetapi sebuah analisis analisis proses tentang bagaimana perubahan bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Smith menolak gagasan bahwa kita telah memasuki era pascanasional. Bangsa dan nasionalisme memang berubah, tetapi tidak lenyap. Daya ikatnya justru tampak dari kesediaan jutaan orang untuk mempertaruhkan nyawa dan harta demi bangsanya sendiri. Selama bahasa dan simbol tetap diapropriasi sesuai dengan kebutuhan zaman maka nasionalisme akan selalu menemukan cara untuk mengikat emosi secara kolektif.

Smith melakukan koreksi kesan bahwa modernisasi saja cukup untuk menjelaskan sebuah bangsa. Modernisasi mungkin dapat menjelaskan bagaimana nasionalisme bisa menyebar tetapi pembentukan sebuah bangsa tetap ditentukan oleh memori etnik, simbolik, warisan institusional, dan proses apropriasi kreatif yang dilakukan oleh aktor modern. Sebuah bangsa perlu memadukan bahan etno simbolik seperti etnie, *myth-symbol complex*, *mythomoteurs*, ritus, dan seni dengan struktur modern seperti pendidikan, media, ekonomi, dan rakyat sebagai sebuah sintesis historis.

Relevansi Pancasila sebagai *Myth-Symbol Complex* dan *Civil Religion*

Inti dari gagasan Smith yaitu bangsa modern memang baru, tetapi tidak lahir dari nol dan bertumpu pada mitos, memori, nilai, simbol, tradisi, dan ritus yang memiliki umur yang panjang *(la longue duree)* serta terus diapropriasi oleh generasi modern (Smith, 2013). Terdapat

tiga jalur utama yang dapat menjelaskan bagaimana masa lalu dapat memengaruhi masa kini yaitu rekurensi, kontinuitas institusional-budaya, dan apropriasi-reinterpretasi. Jika kerangka ini dikaitkan dengan Indonesia, maka Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai legal-formal tetapi juga beresonansi dengan memori dan simbol nusantara seperti narasi persatuan, bahasa persatuan, ikon negara, hingga ritus-ritus kewargaan yang terus hidup dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat sehingga terbentuk sebuah komunitas dan kemudian menjadi sebuah bangsa (Anderson, 1991).

Pendidikan harus mampu menciptakan kesadaran pentingnya kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta pentingnya melindungi nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi negara agar masyarakat memahami dan menjalankan kewajiban sipil (Song, 2025). Kurikulum pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan alat-alat teknologi atau kemampuan untuk melakukan verifikasi fakta, tetapi harus menanamkan kebajikan sipil *(civic virtue)* (Almufarreh & Arshad, 2023).

Pancasila menjadi sebuah payung nilai publik dan *civil religion* di Indonesia (Latif, 2018). Pancasila sebagai *civil religion* yang dapat dimaknai sebagai seperangkat simbol, narasi, dan ritus yang memayungi kemajemukan dan berupaya mencegah terjadinya konflik (Badrun et al., 2023). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Smith yaitu kemenangan nasionalisme bertumpu pada arkeologi politik yakni praktik menggali, menyeleksi, dan menata ulang memori-simbol agar terasa lebih autentik untuk kondisi saat ini (Smith, 2009). Smith menegaskan bahwa nasionalisme memikat karena adanya seni, monumen, dan upacara peringatan dapat menumbuhkan pengalaman bersama. Agama sipil dapat meresonansi kebutuhan makna dari manusia sekuler sehingga hal tersebut dapat menjelaskan mengapa upacara bendera, peringatan kemerdekaan, atau lagu kebangsaan di Indonesia tetap memiliki daya afektif untuk dapat membangun rasa kebangsaan.

Selain itu, internalisasi nilai Pancasila melalui kurikulum, media, dan *civic experiences* memiliki dampak terhadap sikap dan partisipasi aktif pada generasi muda (Adillah, 2022). Pancasila lebih dari sekedar asas normatif tetapi sebagai *myth symbol complex* yang aktif dan sejalan dengan etno-simbolisme yang secara efektif dalam meningkatkan kohesi sosial. Konsep *myth symbol complex* dari Amstrong yang diadopsi oleh Smith yaitu kumpulan mitos dan simbol yang dapat menandai batas dan dapat memperkuat kohesi suatu etnis (Smith, 1999). Smith menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut subjektif karena menyangkut keyakinan dan objek karena menata struktur lembaga dan praktik lintas generasi. Dalam banyak kasus, mitos dapat menjadi pendorong moral dari suatu komunitas *(mythomoteur)*.

Menganalisis Pancasila melalui lensa pemikiran Smith yaitu dapat memnberi pembenaran sosiologis atas praktik yang lazim dilakukan oleh negara dan masyarakat di Indonesia dengan mengikat memori kebangsaan melalui pendidikan, ritus, dan ikonografi seperti bendera, lambang, dan bahasa persatuan sesuai dengan gagasan dari Smith. Selain itu, juga dapat memberi rambu agar rekayasa simbolik dapat bersifat inklusif (Rahawarin, 2021). Nasionalisme sipil dapat menuntut adanya asimilasi budaya yang tinggi sehingga memperkuat Pancasila sebagai *myth symbol complex* tidak boleh berubah menjadi sebuah pemaksaan homogenitas budaya karena sebuah kebijakan harus mampu menjaga ruang perbedaan dalam bingkai kebersamaan (Maswati et al., 2024). Pancasila sendiri memiliki nilai etis publik yang sesuai dengan kebebasan beragama

dan bukan sebuah ideologi yang eksklusif (Rohyana & Lala, 2025). Kehidupan politik dan agama yang beradab justru tumbuh ketika Pancasila dipraktikan sebagai nilai bersama tanpa mematikan kritik (Holidin, 2022).

Kritik Smith pada modernism relevan bagi Indonesia ketika mempertanyakan siapa itu bangsa dan dari mana asal mulanya. Modernisasi menjelaskan tentang proses bangsa bisa menyebar tetapi identitas sebuah bangsa tidak dapat diambil dari modernisasi belaka dan kita perlu menelaah secara mendalam tentang bagaimana memori, bahasa, dan tradisi dapat memberikan kredibilitas bagi sebuah klaim kebangsaan (Smith, 2010). Di Indonesia, narasi kebangsaan yang memayungi keragaman adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sekaligus menjadikan wilayah simbolik Nusantara sebagai tanah air. Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka bersama untuk mencegah terjadinya konflik SARA dan menjadi prasyarat kohesi (Darmaputera, 1987). Internalisasi Pancasila dan nasionalisme melalui pembelajaran PPKn dapat berpengaruh terhadap karakter dan sikap peserta didik yang merupakan bagian dari rekurensi ritus-simbolik yang digagas Smith (Sukino, 2025). Pemeliharaan terhadap memori bersama seperti narasi proklamasi, Bahasa Indonesia, dan simbol kenegaraan harus terus dipraktikkan secara reflektif di sekolah dan ruang publik serta tidak hanya diajarkan sebagai hafalan semata tetapi sebagai pengalaman kewargaan.

Internalisasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)

Ketika Pancasila diposisikan sebagai *civil religion* yang inklusif maka kebijakan yang dibuat harus menghindari pemaksaan terhadap budaya tunggal dan harus lebih mengarah pada inklusivisme berbasis nilai seperti keadilan sosial, musyawarah, dan kemanusiaan. Saat ini, strategi pembelajaran PPKn yang dilakukan lebih menekankan pada etika digital dan partisipasi aktif dimana buku teks PPKn memuat konsep *civil religion.* Pancasila juga memadai sebagai bahasa publik untuk kelompok keagamaan baik mayoritas dan minoritas sehingga bisa menjadi sarana untuk mencapai inklusivitas (Supratikno, 2022). Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu memposisikan Pancasila sebagai nilai, memperkuat ritus inklusif seperti monumen, museum, dan upacara peringatan yang dapat meningkatkan makna kebangsaan, dan bisa melakukan kritik reflektif di kelas terhadap peristiwa sejarah agar Pancasila terus hidup (Walukow et al., 2025).

Smith mengkritik konstruksionisme yang elitis dan mengabaikan pengorbanan orang demi membela bangsanya. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut memperkuat argumen bahwa pembelajaran mengenai Pancasila tidak cukup hanya sekedar pengetahuan deklaratif tetapi juga harus mampu mengaktifkan pengalaman simbolik seperti proyek sosial, gotong royong, dan peringatan hari nasional yang dialogis agar terbentuk kebersamaan yang diikat secara etis bukan sentimentalistik (Rogahang, 2025). Selain itu, eksklusivisme harus dicegah dengan memastikan narasi kebangsaan harus mengakui kontribusi dari semua kelompok baik agama, etnis, dan gender serta membuka ruang kritik yang demokratis. Pancasila sebagai *civil religion* harus menghargai perbedaan sehingga dapat mengikat masyarakat dalam rasa kebersamaan dan nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dengan tepat agar tercipta inklusivitas dan keadilan (Zhang, 2025).

Penekanan internalisasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan

(PPKn) menuntut adanya pergeseran paradigma dari sekadar penguasaan materi tekstual menuju pembentukan kebajikan sipil (*civic virtue*) dan partisipasi aktif peserta didik (Supriadi et al., 2023). Pembelajaran Pancasila sebagai *civil religion* tidak lagi cukup diajarkan secara deklaratif atau hafalan semata, melainkan harus dihidupkan melalui pengalaman simbolik (*experiential learning*) seperti proyek sosial, gotong royong, dan dialog kebangsaan (Nugroho & Wijayati, 2025). Pendekatan dialogis ini menjamin bahwa rekayasa simbolik tidak berubah menjadi pemaksaan homogenitas budaya atau pengebirian kritik, melainkan mengakui kontribusi seluruh kelompok agama, etnis, dan gender (Ashaari et al., 2022). Dengan demikian, kelas PPKn dapat berfungsi sebagai ruang reflektif yang efektif dalam mentransformasikan Pancasila menjadi bahasa publik yang inklusif serta memperkuat karakter demokratis generasi muda.

Strategi Rekontekstualisasi Pancasila di Era Disrupsi Digital

Smith mengemukakan bahwa bangsa itu terus melakukan transformasi. Proyek nasional atau global sering kehilangan simbol pemersatu dan konflik etnonasional justru menunjukkan adanya politisasi memori dan reapropriasi masa lalu padahal seharusnya proyek tersbeut bisa meningkatkan nasionalisme (Bourchier, 2019). Dalam ekosistem digital, perang kebudayaan dan polarisasi identitas menegaskan adanya kebutuhan kurasi narasi Pancasila agar dapat mempersatukan tanpa mengebiri kritik (Ruslan, 2011). Diperlukan pembaruan narasi dan ritus Pancasila ke dalam format media baru digital sehingga akan mudah diakses di era yang serba digital seperti saat ini selaras juga dengan gagasan Smith bahwa diperlukan apropriasi kreatif untuk menghadapi kondisi saat ini (Usmi et al., 2024).

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan Smith dalam PPKn dan komunikasi publik yaitu yang pertama dengan adanya kurikulum yang naratif-reflektif dimana kurikulum harus mengintegrasikan tiga jalur pengaruh masa lalu terhadap masa kini yaitu rekurensi, kontinuitas, dan apropriasi dalam bentuk modul, studi kasus, dan refleksi agar peserta didik dapat memahami bagaimana *myth symbol complex* bekerja (Wulandari et al., 2023). Yang kedua, yaitu dengan ritus kewargaan yang inklusif melalui kegiatan proyek dan dialog kebangsaan yang ramah akan perbedaan yang dapat menjadi *experiental learning* bagi peserta didik (Putra & Samsuri, 2025). Yang ketiga, yaitu ekologi simbolik digital dimana arsip kebangsaan dibuat ke dalam format digital-interaktif yang menjadi respon terhadap era digital saat ini. Yang terakhir, yakni adanya rubrik kritis-etis Pancasila yang mengajak peserta didik untuk menganalisis praktik kebangsaan dan mengaitkannya dengan permasalahan nyata yang dapat menjadi Pancasila sebagai *myth symbol complex* akan tetap hidup sebagai bahasa publik (Suratman et al., 2023).

Kerangka etno-simbolisme Smith memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk dapat memperkokoh Pancasila sebagai *myth symbol complex* negara kebangsaan Indonesia. Pancasila harus mampu diimplementasikan dengan baik melalui apropriasi kreatif yang inklusif sehingga dapat efektif untuk membentuk memori dan simbol secara jangka panjang (Aminah et al., 2024). Secara praktis, kombinasi antara praktik PPKn yang reflektif dan inklusif dan komunikasi publik yang efektif menjadi cara yang masuk akal untuk dapat memperkuat kohesi sosial di tengah era disrupsi digital (Januru et al., 2025).

Tantangan disrupsi digital dan eskalasi polarisasi identitas menuntut

adanya apropriasi kreatif atas *myth-symbol complex* Pancasila agar tetap beresonansi dengan kebutuhan generasi digital (Relatami et al., 2026). Strategi ini diwujudkan melalui pembentukan ekologi simbolik digital, yaitu mentransformasikan arsip sejarah, monumen, dan ritus kebangsaan ke dalam format media baru yang interaktif. Pembaharuan narasi tersebut dilengkapi dengan penggunaan rubrik kritis-etis Pancasila dalam pembelajaran dan komunikasi publik untuk melatih generasi muda menganalisis fenomena sosial secara rasional di dunia maya (Erlande et al., 2024). Melalui integrasi antara kurikulum naratif-reflektif dan kurasi media digital yang inklusif, Pancasila akan terus terpelihara sebagai pendorong moral (*mythomoteur*) yang ampuh dalam menjaga kohesi sosial dan integrasi nasional (Akhuai et al., 2022).

D. Simpulan

Telaah mengenai gagasan Smith menunjukkan bahwa etno-simbolisme memberikan penjelasan mengapa ide negara kebangsaan dapat bertahan lintas zaman yaitu bangsa memang menjadi fenomena modern dari segi bentuk politiknya tetapi identitasnya tetap berakar dari budaya jangka panjang *(la longue duree)*. Terdapat tiga mekanisme penghubung antara masa lalu dan masa kini yaitu rekurensi, kontinuitas institusional-budaya, dan apropriasi kreatif. Dari perspektif Pancasila, gagasan Smith menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai norma konstitusional tetapi hidup sebagai *myth symbol complex* yang mengikat memori dan cita-cita bersama dan memberi orientasi moral bagi warga negara. Penerapan kerangka Smith dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa penguatan Pancasila memerlukan narasi, simbol, dan ritus kewargaan yang inklusif. Dengan demikian, strategi kurikulum, komunikasi publik, dan pengalaman kewargaan harus dapat memadukan narasi sejarah yang kritis dan reflektif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga Pancasila tetap menjadi bahasa publik yang relevan di tengah disrupsi digital.

Daftar Pustaka

Adillah, F. C. (2022). Implementation of living values education Pancasila values in the generation of Indonesians. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1–6. https://doi.org/10.57235/qistina.v1i1.15

Akhuai, W., Nugraha, A. A., Rahayu, Y. K., Lukitaningtyas, D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al, R. A. (2022). Social capital of Pancasila education in smart education with social media in cybercrime prevention in the industrial revolution era. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, *4*(2), 383–442. https://doi.org/10.15294/panjar.v4i2.55047

Almufarreh, A., & Arshad, M. (2023). Promising e merging technologies for teaching and learning: Recent developments and future challenges. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(8), 1–21. https://doi.org/10.3390/su15086917

Aminah, N., Ginting, B., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2024). Implementation of pancasila values through school culture. *International Journal of Students Education*, *2*(2), 354–358.

Anderson, B. R. O. G. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

Ashaari, M. F., Ismail, N. F., Rasit, R. M., & Aini, Z. (2022). Pembangunan model kewarganegaraan digital islami berdasarkan metode fuzzy delphi. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, *38*(4), 97–117. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3804-06

Asshiddiqie, J. (2020). *Pancasila: Identitas konstitusi berbangsa dan bernegara*. Raja Grafindo Persada.

Badrun, Sujadi, Warsah, I., Muttaqin, I., & Morganna, R. (2023). Pancasila, Islam,

and harmonising socio-cultural conflict in Indonesia. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, *61*(1), 137–156. https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.137-156

Bourchier, D. M. (2019). Two decades of ideological contestation in Indonesia : From democratic cosmopolitanism to religious nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, *49*(5), 713–733. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620

Darmaputera, E. (1987). *Pancasila: Identitas dan modernitas*. BPK Gunung Mulia.

Erlande, R., Komalasari, K., Taufika, R., Hardian, M., Fauzan, A., Maharani, A., & Permatasari, M. (2024). Membekali warga negara di era post-truth: Peran krusial pendidikan kewarganegaraan di Australia. *Asanka: Journal of Social Science and Education*, *5*(1), 61–78. https://doi.org/10.21154/asanka.v5i1.9097

Hariyanti, T. (2020). Pancasila as the cultural traits for Indonesian national religious identity in the era of globalization. *EduLite: Journal of English Education, Literature, and Culture*, *5*(2), 359–368.

Holidin, D. (2022). The compatibility of Islam and Pancasila in Indonesia ' s declining democracy. *Politics and Religion Journal*, *59*(2), 209–226. https://doi.org/10.54561/prj1602179h

Januru, L., Puspitasari, R., Rahman, A. G., Milia, J., Maranjaya, A. K., Utama, A. S., Indrayati, R., Muntazarah, F., Khaedir, M., & Zaadi, L. M. A. (2025). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Latif, Y. (2018). Religiosity, nationality, and sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's way. *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, *25*(2), 207–246. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.7502

Maswati, M., Wardah, S., & Das, H. (2024). Values of Pancasila ideology as a multicultural adhesive in Indonesia. *International Journal of Islamic Educational Research*, *1*(3), 70–89.

Nugroho, F. A., & Wijayati, I. W. (2025). Penguatan nilai-nilai kewarganegaraan digital melalui pembelajaran PPKn berbasis teknologi di sekolah dasar. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, *6*(5), 7286–7295. https://doi.org/10.54373/imeij.v6i5.3938

Putra, W. M. M., & Samsuri. (2025). Understanding the concept of civil religion in extbooks Pancasila and Civic Education at high school level. *International Journal of Multicultural and Multireligious*, *12*(8), 354–361.

Rahawarin, Z. A. (2021). Viewing Pancasila in the eyes of nationalists in Indonesian new order era. *Journal of Social Studies Education Research*, *12*(4), 64–92.

Relatami, T., Anjelawati, D., & Kartikawati, D. (2026). Digital ethics in social media to maintain and strengthen the nation's socio-cultural values. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *3*(1), 768–775. https://doi.org/10.62567/micjo.v3i1.1823

Rogahang, S. S. N. (2025). Pancasila as a civil religion : A solution to religion and society in Indonesia. *Internasional Journal of Integrative Sciences (IJIS)*, *4*(6), 1211–1220. https://doi.org/10.55927/ijis.v4i6.328

Rohyana, H., & Lala, A. (2025). *Pendidikan Pancasila: Landasan, nilai, dan implementasi dalam kehidupan*. Cahya Ghani Recovery.

Ruslan, I. (2011). Membangun civil religion pada masyarakat yang plural ; dilema pancasila di era reformasi. *Al Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, *6*(2), 1–28.

Setiawan, P. Y., & Santiago, F. (2022). Religion and the country in the perspective of Pancasila. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(3), 25205–25210.

Smith, A. D. (1999). *Myths and memories of the nation*. Oxford University Press.

Smith, A. D. (2009). *Ethno-symbolism and nationalism: A cultural approach*. Taylor & Francis.

Smith, A. D. (2010). *Nationalism: Theory, ideology, history*. Polity Press.

Smith, A. D. (2013). *Nationalism and modernism*. Taylor & Francis.

Smith, A. D. (2014). *The nation in history: Historiographical debates about ethnicity and nationalism*. University Press of New England.

Song, S. (2025). Philosophy is citizenship like feudalism ? An egalitarian defense of bounded citizenship of bounded citizenship. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, *00*(00), 1–22. https://doi.org/10.1080/13698230.2025.2489249

Sugito, N., Aulia, R., & Rukmana, L. (2021). Pancasila as the establishing ideology of nationalism Indonesian young generation. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *524*(Icce 2020), 177–182.

Sukino. (2025). *Buku ajar pendidikan Pancasila*.

Supratikno, A. (2022). Understanding reinforcing Indonesian national identity based on inclusiveness of Pancasila as a way to deal with the identity politics in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious*, *9*(6), 407–417.

Supriadi, Dhayinta, S. T., Nabuasa, H. A., & Hamdi, M. (2023). Penguatan iterasi berbasis digital melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MA Al-Umm Malang. *Jurnal Pembelajaran Dan Riset Pendidikan*, *3*(2003), 519–524. https://ojs.unublita

Suratman, T., Widayanto, H., Catyaningsih, R., & Dewi, D. K. (2023). *Pancasila jati diri Bangsa Indonesia: Filosofi lambang negara bagi kehidupan bangsa*. PT Kanisius.

Takdir, & Hafidz. (2025). The relevance of civil religion, Pancasila, and civil society in Indonesia: robert n. bellah's sociological perspective. *AL-ITQĀN: Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies*, *10*(1), 42–57. https://doi.org/10.31436/alitqan.v10i1.287

Tompok, P. (2023). Ethno-symbolism and nationalism : A critical review of the framework of ethno-symbolic approach to nationalism. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, *10*(3), 84–88.

Usmi, R., Siregar, H. A., & Soesilo, G. B. (2024). Introducing Pancasila education, civic education in Indonesia. *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCH)*, *2*(04), 394–399.

Walukow, D. S., Situngkir, A., Indha, F., & Putra, S. (2025). Pancasila education as an instrument for shaping student solidarity. *Journal of English Language and Education*, *10*(3), 622–629. https://doi.org/10.31004/jele.v10i3.893

Wardah. (2023). Pentingnya pola komunikasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Dunia Pendidikan*, *4*(1), 145–154. https://doi.org/10.55081/jurdip.v4i1.1467

Wulandari, T., Widiastuti, A., Setiawan, J., & Fadli, M. R. (2023). Development of learning models for inculcating Pancasila values. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, *12*(3), 1364–1374. https://doi.org/10.11591/ijere.v12i3.25687

Zhang, C. (2025). Unity in diversity : the religious , political , and cultural faces of Pancasila. *Advance in Social Behavior Research*, *16*(7), 47–56.